DAFTAR PUSTAKA

Adriani. (2012). Perpajakan Edisi Revisi 2012. Jakarta. Salemba Empat

Alimnisyah & Padji. (2003). Kamus Istilah Akuntansi. Bandung: Yrama Widya.

Astrabadhi A. M, Fauhan. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen (studi kasus di PT Oto Bid Indonesia Cabang Makassar)

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). https://www.jabar.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik. (2023). https://www.bps.go.id/

Dwiyana, Savira Amalia. (2021). Pengaruh kebijakan pemotongan tarif PPnBM produk mobil baru terhadap abnormal return dan trading volume activity

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. (2021). https://www.gaikindo.or.id

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*25. Semarang: Universitas Diponegoro.

Kotler & Armstrong. (2012). *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*. Jakarta. Erlangga.

Kotler & Keller. (2012). *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga

Lisnawati. (2016). Persepsi masyarakat terhadap kebijakan penghapusan pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) (studi kasus pasar Tangerang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten)

Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta. Andi Offeset.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Presiden Republik Indonesia. (2000).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Presiden Republik Indonesia. (2009).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Presiden Republik Indonesia. (2012).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Presiden Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Riningsih, D. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Pajak PPnBM Mobil Terhadap Penjualan Mobil Di Era Pandemi *Covid-19*. *SENMEA*

Rosadi, Dedi. (2012). Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews. Yogyakarta: Andi

Ruwiana. (2016). Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap tingkat penjualan dan laba PT Wahana Megahputra Makassar

Sambur, Noviane Pinkan. (2015). "Analisis PPn dan PPnBM terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor (studi kasus pada konsumen kendaraan bermotor roda empat dan roda dua PT Hasjat Abadi Manado)

Soemitro, Rochmat. (2009). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung. Refika Aditama

Sriyana, Jaka. (2014). Metode Regresi Data Panel. Yogyakarta: Ekonisia

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development. Bandung: Alfabeta

Sutisna. (2012). Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran Edisi 2. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tricinta, Evieta Islamiati. (2021). Pengaruh penghapusan PPnBM 100% dan potongan harga perusahaan terhadap volume penjualan (Studi Kasus Pada Produk

Toyota Avanza, Veloz, Rush dan Yaris Periode Maret-Mei 2021 di Dealer Toyota Kota Depok)

Widarjono, Agus. (2013). Ekonomika Pengantar dan Aplikasi eviews. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yuniarti, D., Subiyakto, B., & Putra, M. A. H. (2020). Economic Activities in kuin floating market as a Learning Resource on Social Studies. The Kalimantan Social Studies Journal.